



Guru Indonesia: Di Antara Birokrasi, Kurikulum, Transformasi Digital, dan Kesejahteraan Sosial

Agus Helfi Rahman^{1*}, Novia Tryas Putri², Sholeh Hidayat³

Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

Agusrahman54@guru.slb.belajar^{1*}, noviatp@gmail.com^{2*}, sholeh.hidayat@untirta.ac.id^{3*}

Abstrak: Potret pendidikan nasional kita dapat dikatakan belum berjalan secara optimal sesuai tujuannya. Bila dibandingkan dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia negara-negara maju, kita harus mengakui masih tertinggal jauh. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, atau Vietnam pun, kita juga tertinggal. Kajian ini bertujuan menggali dan memetakan empat masalah pada sebagian guru yang dianggap menjadi beban mental mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Keempat masalah tersebut adalah daya dukung birokrasi, dilema pergantian kurikulum, tantangan era digital, dan sistem kesejahteraan sosial-ekonomi. Kajian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan lebih banyak mengedepankan pandangan para penulisnya, didukung oleh kajian atau penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal sebagai referensi pembanding atau penguat kajian ini, juga dengan memanfaatkan laporan-laporan dari sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa faktor birokrasi, kurikulum, transformasi digital, dan kesejahteraan sosial-ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kualitas para guru. Dengan demikian, kajian ini berkesimpulan bahwa keempat hal tersebut harus dibenahi, mulai dari reformasi birokrasi pada sektor pendidikan, implementasi kurikulum yang tidak membebani tugas administratif para guru, kemampuan para guru melaksanakan transformasi digital, serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi para guru. Diharapkan hasil kajian ini turut menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, menjadi perhatian pemerintah dalam mengambil keputusan, serta menjadi salah satu acuan bagi para guru dalam meningkatkan kompetensinya.

Kata kunci: birokrasi, pergantian kurikulum, tantangan era digital, kesejahteraan sosial-ekonomi guru.

Indonesian Teachers: Between Bureaucracy, Curriculum, Digital Transformation and Social Welfare

Abstract: The portrait of our national education can be said to have not run optimally according to its objectives. Compared to achieving the quality of human resources of developed countries, we must admit that we are still far behind. Even compared to neighboring countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, or Vietnam, we are also lagging. This study aims to explore and map four problems for some teachers that are considered a mental burden in carrying out their duties as educators. These four issues are bureaucratic support, the dilemma of curriculum changes, the challenges of the digital era, and the socio-economic welfare system. This study is descriptive and qualitative with more emphasis on the authors' views, assisted by previous studies or research from various journals as a comparative reference or reinforcement of this study, and by utilizing reports from other official sources. The results show that bureaucracy, curriculum, digital transformation, and socio-economic welfare significantly affect teachers' quality. This study concludes that many things need to be addressed, ranging from bureaucratic reform in the education sector, curriculum implementation that does not burden the administrative duties of teachers, the ability of teachers to implement digital transformation, and improving the socio-economic welfare of teachers. It is hoped that the results of this study will also become reference material for further research, become a concern for the government in making decisions, and become one of the references for teachers in improving their competence.

Keywords: bureaucracy, curriculum changes, challenges of the digital era, socio-economic welfare of teachers.

1. Pendahuluan

Konstitusi negara menjamin hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengajaran. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, pemerintah wajib menyelenggarakan dan membiayai sistem pendidikan nasional. Undang-undang mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sekurang-kurangnya dua puluh persen APBN/APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah Republik Indonesia semenjak negara kita berdiri hingga pemerintahan saat ini telah berusaha mengimplementasikan amanat konstitusi tentang urusan pendidikan ke dalam perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tata cara penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Sisdiknas memberikan pedoman lengkap tentang pengertian pendidikan nasional, fungsi dan tujuan, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional (BPK RI, n.d.). Demikian pula halnya terkait para guru yang ditugaskan sebagai pelaksana di garis depan pendidikan anak-anak bangsa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menjamin hak guru untuk mendapatkan penghasilan yang layak, di atas kebutuhan hidup minimum dan juga menerima jaminan kesejahteraan sosial (Setkab RI, n.d.).

Penyelenggaraan pendidikan nasional memang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, tetapi pemerintah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkannya karena pemerintah yang mempunyai kuasa anggaran dan diamanahi wewenang untuk merealisasinya. Di tengah era digital di mana transformasi bergerak sedemikian cepat dan masif, pemerintah harus mampu memimpin dan mengarahkan segenap potensi kekuatan bangsa untuk menghadapinya. Pendidikan menjadi kunci utama investasi bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional melalui ketersediaan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing global.

Bila menatap potret pendidikan nasional kita yang masih dapat dikatakan belum berjalan secara optimal sesuai tujuannya, maka banyak faktor perlu dibenahi. Pendidikan kita masih jauh tertinggal dibanding dengan pencapaian kualitas sumber daya manusia negara-negara maju. Bahkan dibandingkan Malaysia, Singapura, Thailand, atau Vietnam pun, kita juga tertinggal. Keteringgalan ini jelas berdampak pada lemahnya daya saing kita di tingkat global, baik pada sektor pendidikan itu sendiri, kualitas tenaga kerja, hingga kemajuan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, pendidikan menjadi kunci bagi untuk mengejar ketertinggalan, berdaya saing global di tengah liberalisasi dunia, sekaligus dalam rangka menyejahterakan rakyat.

Bila guru dianggap sebagai garda terdepan kemajuan di sektor pendidikan, maka segala daya dukung bagi kemajuan para guru pun harus diprioritaskan oleh pemerintah. Segala hambatan birokratis harus dipangkas dan pemerintah harus benar-benar berorientasi melayani kepentingan dan kebutuhan para guru dalam tugas mulia tersebut. Pada aspek lain berkenaan dengan kurikulum dan dinamika penerapannya, harus fleksibel dan membuat guru semakin paham dan berdaya karenanya. Pergantian kurikulum jangan menjadi kendala administratif yang menghabiskan porsi waktu para guru di lapangan. Dihadapkan dengan situasi global sekarang ini di mana transformasi digital berjalan sangat cepat dan masif dan berpotensi mendatangkan disrupsi oleh karena perubahan pola-pola informasi dan komunikasi, para guru harus membuka diri serta juga aktif membekali diri dengan kecakapan digital. Bila selama ini kompetensi guru bermuara pada empat bidang; pribadi, sosial, pedagogi, dan profesional, kompetensi digital mungkin sudah saatnya menjadi kompetensi kelima sebagai penyempurna keempat kompetensi lainnya. Masalah klasik lainnya dan masih krusial bagi para guru adalah kualitas kesejahteraan mereka. Keempat permasalahan yang melingkupi keseharian para guru di Indonesia tersebut harus segera ditata dan dicarikan penyelesaiannya yang segera dan berkeadilan agar tidak menjadi beban mental para guru dalam bertugas. Sebaliknya malah menjadi faktor yang signifikan daya dukungnya terhadap kelancaran, kenyamanan, dan motivasi berkelanjutan bagi para guru.

Hasil kajian ini diharapkan turut menjadi bahan referensi bagi kajian-kajian sejenis selanjutnya. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan ke depan. Bagi para guru pun, penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi diri dalam memperbaiki kualitas dan pengembangan diri masing-masing.

2. Metode Penelitian

Kajian ini disusun dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Studi literatur dimaksud di sini merupakan hasil kajian-kajian jurnal ilmiah, buku, atau sumber-sumber resmi lainnya yang dinilai layak dijadikan bahan referensi untuk

mendukung kajian ini. Sumber-sumber literatur berasal dari jurnal-jurnal penelitian dan buku-buku yang dipublikasikan dalam rentang 2017 hingga tahun 2023.

Melalui pendekatan ini penulis menganalisis dan menyintesis literatur yang relevan tentang birokrasi, kurikulum, transformasi digital, dan kesejahteraan sosial-ekonomi guru. Penulis berusaha untuk secara cermat menelaah dan memanfaatkan data-data akademis, baik yang diakses secara daring maupun buku-buku yang ada pada penulis. Penulis juga melakukan teknik analisis komparatif dengan membandingkan dan mengontraskan aneka pandangan dan temuan dalam literatur-literatur lain. Dalam konteks kajian ini, penulis sangat menyadari pentingnya studi literatur untuk membangun landasan teoretis, memahami latar belakang, menemukan celah pengetahuan (*gaps*), serta untuk menguatkan pandangan penulis pada kajian ini. Meskipun tidak melibatkan penelitian lapangan langsung, pendekatan ini tetap kritis dalam proses analisis, sintesis, dan interpretasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis.

Pada kajian ini penulis berupaya menyampaikan gagasan dan pandangan untuk turut menggali, memetakan masalah, serta berupaya turut menyampaikan solusi-solusi yang dinilai layak untuk dapat turut memperbaiki carut-marutnya pendidikan nasional kita pada empat masalah yang dikaji.

Tugas guru sangat berat di garda terdepan di dunia pendidikan dalam kewajiban mulia mencetak generasi bangsa agar menjadi insan sejati. Tugas berat tapi mulia guru tersebut perlu mendapatkan sokongan moral dan meteril oleh banyak pihak, terutama pemerintah. Namun, masih saja dirasakan oleh sebagian kalangan guru, bahwasanya banyak kendala bagi mereka dalam bertugas yang membuat mereka kurang nyaman. Kendala-kendala tersebut sebagian diantaranya adalah hambatan birokrasi, dilema pergantian kurikulum, tantangan transformasi di era digital, serta masalah kesejahteraan sosial-ekonomi. Poin-poin inilah yang menjadi fokus elaborasi kajian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam sebuah negara modern birokrasi merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan dalam melayani kepentingan masyarakat luas dalam segala hajat hidupnya.

Sebagai instrumen penting pemerintahan, dengan struktur piramida dari pemerintahan paling tinggi hingga pemerintahan paling rendah, seharusnya birokrasi melayani kepentingan setiap orang maupun kelompok secara efektif dan efisien, bukan menghambat dan menciptakan mekanisme kolusi antara oknum-oknum di pemerintahan dengan pihak luar yang memerlukan layanan mereka. Situasi demikianlah yang justru hingga saat ini terjadi. Inilah apa yang dinamakan dengan istilah patologi birokrasi, situasi lingkungan pemerintahan yang ribet, kaku, dan bertele-tele dalam layanan, kurang transparan serta koruptif (Yoesoef Maolani et al., 2022).

Terjadi situasi dan kondisi yang seolah saling menguntungkan sehingga muncullah kegiatan transaksional dengan dalih macam-macam, baik sekedar basa-basi, demi keuntungan ekonomi, ewuh-pakewuh, kelaziman, atau dalih penggunaan perangkat dalam proses pelayanan (Amruddin et al., 2022). Karakter birokrasi seperti ini juga berlaku, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan kita.

Hambatan kemajuan pendidikan yang disebabkan oleh penyakit birokrasi dapat kita rasakan dan amati seperti pada aspek pencairan bantuan anggaran untuk sekolah-sekolah, pengadaan-pengadaan prasarana dan sarana pendidikan, seleksi dan penempatan kepala sekolah, pengawas sekolah, mutasi pendidik dan tenaga kependidikan, sistem PPDB di tiap awal tahun ajaran, pungutan-pungutan liar terhadap tiap aspek kesejahteraan guru, baik gaji, tunjangan, maupun urusan kenaikan pangkat bagi guru PNS.

Secara umum dan lebih rinci, Sondang P. Siagian dalam (Amruddin et al., 2022) mengidentifikasi bermacam jenis penyakit birokrasi, antara lain; menyalahgunakan wewenang jabatan, berasas praduga atau sangkaan, sering mengaburkan masalah, gratifikasi, benturan antar kepentingan, mempertahankan situasi, membangun dinasti kekuasaan, sering berpuas dengan diri sendiri, KKN, Paranoid dan narsisme, menekan bawahan, hubungan patron, menolak kritik atau masukan kebenaran dari pihak lain, anti terhadap orang asing, alasan ritual, kontraproduktif, berkemampuan rendah dalam penyelesaian pekerjaan, jumud alias stagnan, menyabotase pekerjaan orang lain, bertindak diskriminatif, bertele-tele, budaya menjilat atasan, menolak perubahan karena kepentingan pribadi atau kelompok.

Mendikbud Ristek, Nadiem, Makarim, dalam pidatonya pada peringatan HGN tahun

2019 mengatakan bahwa guru Indonesia itu memiliki tugas termulia dan juga paling untuk mencetak generasi penerus pemegang tongkat kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Namun pada praktiknya, guru-guru dinilai terlalu banyak mendapat beban berupa banyaknya perangkat peraturan, tetapi minim dukungan atau bantuan. Para guru memiliki semangat dan keinginan besar untuk membantu anak-anak didiknya yang tertinggal, tetapi waktunya lebih banyak dituntut untuk mengerjakan setumpuk tugas administrasi kelas yang tidak terlalu signifikan kegunaannya. Para guru sangat memahami bahwa potensi peserta didik tidak hanya dilihat dari nilai-nilai angka pada setiap ujian, tetapi tekanan birokrasi pendidikan di tiap daerah dan juga para pemangku kepentingan lainnya (kepala sekolah, orang tua), memaksa mereka harus berbuat demikian. Guru-guru Indonesia sangat menyadari pentingnya membawa anak-anak didik ke luar mengamati lingkungan sekitar, tetapi tuntutan kurikulum terlalu padat sehingga seolah menutup mereka berpetualang menjelajah alam sekitar atau lingkungan pembelajaran lainnya. Para guru Indonesia paham bahwa bukan hapalan yang membuat anak-anak didik sukses, tetapi tumbuh dan berkembangnya nalar kritis anak yang membuat mereka mampu berkreasi, berinovasi, bekerja sama, dan saling berkomunikasi secara aktif sekaligus menyenangkan. Para guru Indonesia juga paham bahwa perbedaan karakteristik tiap anak didik berimplikasi terhadap kebutuhan layanan pembelajarannya, tetapi penyeragaman kurikulum dan, lagi-lagi, *vested interest* birokrasi telah mendegradasikan adanya keberagaman. Guru sangat berkeinginan kuat menginspirasi tiap anak, tetapi kurang daya dukung, peluang dan kesempatan untuk melakukan kreasi dan inovasi (Pengelola Web Kemdikbud, 2019).

Apa yang disampaikan oleh Mendikbud Ristek tersebut perlu digarisbawahi sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghormati posisi guru serta niat baik untuk memajukan pendidikan dengan membebaskan guru untuk berinovasi dalam pembelajaran tanpa perlu khawatir oleh kungkungan birokrasi, yang notabene, seolah selalu menuntut keseragaman pola pelaksanaan dan kenaikan angka-angka statistik dalam pelaporan tanpa bersedia mengetahui dan memahami fakta-fakta sesungguhnya mengenai segala daya dukung sistem pendidikan di daerah masing-masing. Alih-alih menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, karakteristik birokrasi di negara kita, termasuk dalam bidang pendidikan, pada

praktiknya malah menjadikan unsur-unsur di lingkungan pendidikan menjadi pelayan bagi kepentingan jajaran mereka.

Birokrasi selalu saja menjadi alat kekuasaan politik dalam menampilkan potret statistik kemajuan pendidikan di daerah-daerah. Tidak terkecuali di dunia pendidikan yang juga menjadi sarana kepentingan pelanggaran kekuasaan (Hidayat, 2023). tingkah laku aparaturnya mendapat sorotan tajam dari publik dan dianggap sebagai faktor penghambat kemajuan dunia pendidikan (Maria et al., 2018). Terkait buruknya birokrasi sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan nasional, hal ini juga pernah diungkapkan secara tegas oleh Anies Rasyid Baswedan saat memangku jabatan Mendikbud Ristek Republik Indonesia 2014-2016, pada sebuah kesempatan di hadapan para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia (Baswedan & Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas Jakarta, n.d.)

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret dalam memberantas penyakit-penyakit birokrasi agar pendidikan nasional mampu mengejar dari ketertinggalan dari negara-negara lain, juga agar daya saing anak-anak bangsa meningkat di tengah persaingan global. Transformasi atau reformasi birokrasi menjadi keharusan dan dijadikan langkah krusial dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan cepat tanggap terhadap kepentingan masyarakat (Sah Kha Mei Zsazsa & Nasution, 2023). Ini sejalan dengan pandangan penulis yang berpendapat transformasi dan reformasi birokrasi terutama di sektor pendidikan sudah sangat mendesak untuk dijalankan demi mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan kita dari negara-negara lain.

Lalu model atau tipe birokrasi seperti apakah yang ideal untuk menjamin keterlaksanaan sistem pendidikan nasional kita, sekaligus mendukung tumbuh dan berkembangnya generasi muda yang berdaya saing tinggi, unggul dalam kompetisi internasional? Konsep birokrasi modern klasik dari Weber dengan karakteristiknya yang terstruktur secara hierarkis, pembagian tugas yang spesifik, aturan tertulis, impersonalitas, dan rasionalitas, dipandang masih relevan dengan situasi sekarang. Dalam situasi kontemporer kini di mana tantangannya lebih kompleks dan makin rumit, maka perlu sintesis antara konsep Weberian tersebut dengan kreativitas yang adaptif dengan kebutuhan saat ini (Devi et al., 2023). Dalam era digital, kita membutuhkan birokrasi pendidikan yang cepat merespons dan

antisipatif terhadap setiap perubahan dan perkembangan lingkungan global. Agar lebih efisien dan akurat, segala layanan administrasi bisa dikemas dalam secara daring berbasis digital (Aulia, 2023).

Sehubungan dengan posisi sentralnya dalam lapangan pendidikan, para guru sangat layak untuk diutamakan pelayanannya secara prima oleh birokrasi. Para pendidik dan tenaga kependidikan di tiap sekolah harus diprioritaskan untuk dihargai dan diperlakukan secara manusiawi, bukan untuk sebaliknya, sebagai pelayan birokrasi dan dijadikan sasaran eksploitasi kepentingan politis pemerintah, baik dari tingkat pusat, juga hingga daerah-daerah (Tenri Sanna, 2021). Pada akhirnya, birokrasi yang diharapkan melayani kepentingan kalangan pendidikan adalah birokrasi yang mampu menjalankan dan mengontrol tugas pokok dan fungsinya ditunjang oleh program pembinaan di dalamnya sehingga terus meningkatkan kemampuannya (Istanto et al., 2022).

Kurikulum diibaratkan sebagai ruh pendidikan (Santikaet al., n.d.). Sederhana apapun modelnya, kurikulum merupakan pedoman mutlak penyelenggaraan pembelajaran, supaya pembelajaran tidak kehilangan tujuan dan orientasinya. Sebagai ruh atau pedoman, kurikulum mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya. Sumber-sumber daya ideologi dan kebudayaan suatu lingkungan direspons dan direpresentasikan sebagai kurikulum pendidikan masyarakatnya melalui proses distribusi selektif oleh pelaku-pelaku pendidikan (Apple, 2021). Secara umum kita ketahui bahwasanya kurikulum dibuat berdasarkan empat landasan utama, yakni secara filosofis, sosiologis, psikologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sejalan dengan apa yang dilaporkan oleh Mubarok, dkk (Mubarok et al., n.d.), Sholeh Hidayat, dalam (Zabdul Aziz et al., 2022), (Muslim, 2022), dan (Kamalatul Isy et al., 2023).

Kurikulum Pendidikan nasional di negara kita pun demikian, penyusunan tiap kurikulum dan setiap pergantiannya, sejak Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka Belajar 2022, dilandasi oleh aspek-aspek filosofis- ideologis, psikologis, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut pandangan penulis, rasional dan normatif, apabila kurikulum selalu berganti, selama berdasarkan kajian komprehensif lintas disiplin keilmuan yang melibatkan para pemangku kepentingan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya, tetapi tetap dalam koridor dasar negara dan konstitusi. Sebab idealnya kurikulum memang harus selalu berubah atau

berganti mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangankan juga pergantiannya terlalu sering dan cepat, karena dapat menimbulkan kesimpangsiuran pelaksanaannya di tiap daerah (Rizki Hadiansyah & Yudha Pradhana, 2020).

Selama ini setiap kali terjadi pergantian kurikulum pendidikan, persepsi publik acap kali cenderung dilandasi oleh preferensi politis dan ideologis, serta bias kepentingan kelompok. Namun hal demikian wajar pula karena selama ini tradisi pergantian kurikulum pendidikan di negara kita selalu terjadi seiring pergantian rezim pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah harus mampu meyakinkan khalayak luas bahwa pergantian kurikulum adalah rasional berdasarkan kajian multidisiplin keilmuan serta melalui serangkaian tahap uji coba yang hasilnya layak diterapkan secara keseluruhan, seperti halnya pada pergantian Kurikulum 2013 oleh Kurikulum Merdeka Belajar.

Namun demikian, seiring dengan telah ditetapkannya Kurikulum Merdeka Belajar oleh pemerintah, maka dengan demikian pula, suka atau tidak suka, kurikulum baru tersebut harus diimplementasikan oleh tiap satuan pendidikan. Para guru berkewajiban melaksanakannya secara sungguh-sungguh agar para peserta didik tidak mendapatkan kerugian akibat pro dan kontranya. Patut diapresiasi pula, bahwasanya dalam penerapannya oleh tiap satuan pendidikan atau sekolah, pemerintah memberi pilihan bebas secara gradual. Artinya bahwa, sesuai namanya, para guru merdeka untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Sistem pendidikan nasional kita sekarang sedang menggunakan dua kurikulum sebagai acuan, yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka Belajar. Secara gradual Kurikulum Merdeka Belajar akan menggantikan Kurikulum 2013. Penggantian kurikulum ini bertujuan menyempurnakan kurikulum sebelumnya sebagai bentuk adaptasi atas segala perkembangan global. Kurikulum pendidikan seyogianya memang harus dinamis, ditinjau ulang, diperbaharui, disempurnakan atau bahkan diganti sama sekali. Setiap pergantian kurikulum tentunya dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal dan relevan serta kontekstual dengan perkembangan zaman. Demikian pula halnya dengan Kurikulum Merdeka Belajar, landasan filosofis, landasan sosial, landasan teknologis, dan landasan ideologis menjadi awalan yang adekuat atas hasil kajian akademis yang komprehensif, sehingga menghasilkan dasar hukum yang sah dalam implementasinya secara nasional.

Kurikulum Merdeka Belajar ditujukan untuk menyempurnakan Kurikulum 2013, padahal Kurikulum 2013 dianggap sebagai kurikulum yang bagus oleh banyak pakar dan belum mengendap di kalangan pendidikan. Banyak pakar yang menilai bahwa penyempurnaan Kurikulum 2013 oleh Kurikulum Merdeka Belajar bukanlah pada hal-hal esensial, tetapi lebih bersifat penggantian peristilahan. Ini sejalan dengan hasil penelitian (Ayu et al., 2022) yang menilai bahwa perubahan Kurikulum 2013 oleh Kurikulum Merdeka Belajar tidaklah bersipat menyeluruh, tapi pada aspek-aspek metode, materi, media, strategi, alokasi waktu dan model penilaiannya.

Menurut data yang dirilis Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskujar) Kemendikbudristek, hingga saat ini, sudah hampir 70% sekolah di seluruh Indonesia telah melaksanakan Kurikulum Merdeka (Pengelola Web Kemdikbud, 2023) Sekolah-sekolah yang telah menjalankan Kurikulum Merdeka Belajar ini terkategori atas tiga kelompok, yakni melalui opsi Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Tiga puluh persen sisanya, sebenarnya telah pula mendapatkan informasi Kurikulum Merdeka Belajar, baik melalui informasi resmi Pemerintah melalui Platform Merdeka Mengajar, seri-seri webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek, para guru penggerak, serta komunitas-komunitas belajar. Meski demikian, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada tiap satuan pendidikan atau sekolah untuk pada akhirnya seluruhnya melaksanakan kurikulum baru tersebut.

Berdasarkan buku Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Belajar yang disusun oleh Pusat Kurikulum, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dirilis pada Februari 2022, dijelaskan secara lengkap latar belakang diterapkannya Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar dilatarbelakangi oleh situasi memprihatinkan terkait selalu rendahnya skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) para peserta didik kita dalam 18 tahun terakhir (2000-2018), fenomena tingginya masalah perundungan yang dialami oleh para peserta didik Indonesia, dan fenomena-fenomena tersebut diperparah oleh datangnya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 (Anggraena et al., 2021). Masih lekat dalam ingatan kolektif kita, saat dunia pendidikan mengalami *learning loss* akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi makin meluas dan mendalamnya *learning loss*

karena pandemi COVID-19 tersebut, maka pemerintah membuat kurikulum darurat yang menjadi prototipe sebelum mewujudkan sebagai Kurikulum Merdeka Belajar. Melalui Kurikulum Prototipe tersebut, muatan materi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 disederhanakan, lebih kepada pemilihan materi-materi esensial. Model layanan atau penyelenggaraan pembelajaran pun disesuaikan dengan situasi darurat pandemi, yakni moda belajar daring yang diistilahkan dengan BDR (Belajar Dari Rumah). Melalui moda BDR, para guru mengampu pembelajaran dari rumah mereka kepada para peserta, juga di rumah mereka masing-masing dengan dukungan jaringan internet. Pada situasi darurat luar biasa seperti inilah, pembelajaran dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas digital menjadi sangat berarti serta terbukti menjadi penyelamat disrupsi dan *learning loss*.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo, pada tanggal 26 juni 2023 di Jakarta mengatakan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar ini juga sebelumnya telah diujicobakan pada 3000 sekolah penggerak (2021), kemudian meningkat menjadi 140.000 sekolah (2022) dan 160.000 sekolah di tahun 2023 (Astunggoro, Ronggo, 2023). Dengan pergantian Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Merdeka Belajar, apakah akan memudahkan atau sebaliknya menambah berat beban guru, perlu pembuktian beberapa tahun ke depan.

Dengan melihat hasil positif yang dicapai oleh sekolah-sekolah yang diujicobakan penerapannya, maka Kurikulum Merdeka Belajar ditawarkan untuk diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan secara sukarela pada Tahun Ajaran 2022-2023. Selanjutnya nanti pada tahun 2024 akan diputuskan sebagai pengganti tetap Kurikulum 2013. Dengan memperhatikan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar ini adalah penyempurnaan dari Kurikulum 2013 yang disederhanakan, maka seharusnya kurikulum ini mudah untuk diterapkan oleh para guru di sekolah dan kelas masing-masing. Namun demikian masih kita dapati beberapa kalangan guru yang memandang kurikulum ini lebih menuntut alokasi waktu yang lebih banyak dalam penerapannya, tidak lebih sederhana dari Kurikulum 2013, serta lebih ke pergantian peristilahan dan format administrasinya. Mungkin hal inilah yang dianggap membebani sebagian kalangan guru kita.

Satu hal yang menjadi prasyarat sangat penting terkait penerapan Kurikulum Merdeka Belajar ini, sesuai dengan namanya, adalah tertanamnya jiwa merdeka pada tiap guru

Indonesia. Merdeka untuk berinovasi, melahirkan kreasi-kreasi model pembelajaran yang menyenangkan para peserta didik, serta merdeka dari tekanan birokrasi. Sebelum merdeka belajar dan merdeka mengajar diterapkan di seluruh jenjang, termasuk kampus merdeka, guru-guru kita sudah memahami, memiliki jiwa merdeka, serta punya daya tawar yang kuat dalam mengimplementasikannya. Sebelum merdeka belajar, ada baiknya kita terbiasa belajar berpikir secara merdeka. Dengan demikian, guru-guru Indonesia tidak kembali terjebak dalam kegamangan akibat tekanan birokrasi. Masih cukup banyak didapati guru-guru yang jiwa dan pikirannya belum merdeka dalam mengimplementasikan kurikulum dan perubahannya dari waktu ke waktu. Padahal setiap kurikulum tidak bersifat mutlak diterapkan secara model standarnya. Tiap kurikulum selalu menyisakan ruang untuk diduplikasi seluruhnya, diadaptasi sesuai keperluan, dimodifikasi sesuai karakteristik tiap peserta didik, bahkan jika harus diisi sama sekali. Demikian pula halnya dengan Kurikulum Merdeka Belajar.

Sepertinya kita harus lebih serius melakukan refleksi kritis dalam memahami hakikat pendidikan untuk perbaikan sistem pendidikan nasional agar benar-benar terasa dan bermakna sebagai strategi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil dari penataan sistem pendidikan nasional yang baik dalam ini jelas akan melahirkan insan-insan yang baik dan unggul. Hasil dari investasi pendidikan ini akan saling berpengaruh positif dengan baiknya pemerintahan, majunya kesejahteraan umum, dan peran serta aktif kita dalam ikut memelihara ketertiban dunia. Refleksi kritis dan berkelanjutan juga perlu terus kita lakukan karena geliat kemajuan zaman dan perkembangan teknologi serta deras arus informasi baru setiap hari yang seolah memalingkan kita dari makna-makna hakiki jati diri bangsa. Refleksi kritis dan pembaruan senantiasa relevan dan sangat penting untuk beradaptasi, menyeimbangkan, dan menyelaraskan deras dan masifnya revolusi digital yang menghasilkan informasi-informasi terbaru.

Dalam konteks kepentingan pemeliharaan, pemantapan, serta pemuliaan jati diri nasional atau identitas kebangsaan kita, dunia pendidikan harus cepat tanggap, cerdas, dan tepat kelola atas segala fenomena di era digital. Kompleksitas revolusi dan transformasi digital sangat berpotensi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bila kita lambat merespons, lambat beradaptasi, lemah/gagap dalam penguasaan, serta tertinggal

dalam berinovasi atas transformasi digital, maka kita akan menjadi bangsa dan negara yang tertinggal. Pada tataran inilah, orang-orang terdidik harus tetap ajeg mempertahankan eksistensi kecendekiawanannya dalam menyerap, mengelola, serta menyebarluaskan kembali informasi secara arif kepada khalayak. Dalam konteks kajian ini, orang-orang terdidik yang dimaksud tentunya adalah para guru dalam fungsinya sebagai agen perubahan di tengah lingkungan pendidikan, yakni mengantarkan anak-anak didiknya menjadi insan mulia yang beriman dan berilmu yang tangguh dan unggul dalam kompetisi global.

Bila kita cermati dan telaah lebih mendalam, Kurikulum Merdeka Belajar memang dipersiapkan pemerintah secara lebih khusus untuk mempersiapkan para pelajar kita yang seiring keharusan menghadapi revolusi digital 4.0 yang sedang beralih secara cepat ke era revolusi digital 5.0. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital begitu masif dan sangat cepat bergulir. Asumsi bahwa teknologi dengan segala perangkatnya sudah merupakan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Oleh karenanya, para guru dituntut untuk mampu menjadi fasilitator bagi para peserta didiknya dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar dalam pembelajaran (Hasanah & Haryadi, 2022).

Kunci kemajuan bangsa di era digital ini adalah kemampuan beradaptasi dan kepiawaian untuk turut pula sebagai pelaku digitalisasi, sekaligus turut menjadi inovatornya. Untuk kepentingan dunia pendidikan, digitalisasi pada sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional kita menjadi suatu keharusan. Seperti halnya negara-negara maju yang berhasil dengan transformasi digital, maka negara kita pun harus demikian. Fenomena digitalisasi telah menjadi paradigma baru dalam pembelajaran melalui strategi berpikir kritis, berkreasi dan berinovasi, saling bekerja sama dan saling mengkomunikasikan temuan-temuan atau cara-cara baru kebermanfaat teknologi digital (Rahman et al., 2023). Ini sejalan dengan hasil kajian Kamanto Sunarto tentang Pendidikan di era transformasi sosial budaya abad 21 (Wisudo et al., 2021).

Maka dengan demikian, kita memerlukan rasio ketercukupan guru yang memiliki kapasitas mumpuni dalam penguasaan teknologi digital untuk ditransformasikan ke dalam pembelajaran bersama anak-anak didiknya. Dunia pendidikan kita sekarang ini mendesak untuk secara signifikan, banyaknya para guru yang bukan hanya melek digital, tetapi juga mengetahui dan memahami setiap potensi negatifnya, serta

sekaligus mampu menjadi pembendung dampak-dampak negatifnya tersebut.

Sebagai gambaran, dalam keseharian penulis mengamati langsung, baik di dunia nyata sehari-hari atau di dunia maya, tampak betapa rendahnya *digital awareness* dan *digital coping skill* para guru kita. Kalaupun guru-guru kita berhubungan dengan dunia dan perangkat digital melalui aplikasi-aplikasinya, mereka lebih cenderung menggunakan *platform-platform* media sosial seperti *WhatsApp, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook* sebagai sarana hiburan pribadi. Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Guru-guru kita bukannya menjadi agen sosial yang menjalankan peran tepat dalam transformasi digital di sektor pendidikan, tetapi malah turut terjebak dalam larut dalam tipuan pesona digitalisasi. Banyak guru dengan gawai di tangan mereka yang bereksistensi digital secara serampangan sebatas pada aktivitas perbincangan maya nirmakna, mengunduh dan mengunggah konten-konten untuk keperluan kesenangan pribadi, turut mereproduksi informasi-informasi digital tanpa seleksi, dan yang paling marak tentunya, berswafoto, baik pribadi atau kelompok. Fenomena inilah apa yang disebut sebagai evolusi manusia dari statusnya sebagai *Homo sapiens* menjadi *Homo digitalis* (Budi Hardiman Y, 2018).

Guru harus dikondisikan dan didorong untuk senantiasa mengembangkan dirinya, termasuk pada aspek pengembangan digitalisasi. Mengingat pentingnya transformasi digital pada sektor pendidikan, menurut hemat kami sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan kompetensi digital dijadikan sebagai kompetensi kelima dari empat pilar kompetensi guru lainnya.

Kesejahteraan, baik secara ekonomi maupun secara sosial, merupakan motivasi utama tiap profesi. Setiap orang pasti mendambakan kemakmuran melalui pekerjaan atau profesi yang dipilihnya. Demikian pula para guru, faktor kesejahteraan merupakan salah satu motivasi utama dalam berprofesi sebagai pendidik. Kinerja atau prestasi guru adalah motivasi kerja, dan motivasi kerja guru dipengaruhi—terutama—oleh kesejahteraan sosial-ekonominya. Bentuk kesejahteraan sosial ekonomi guru didapat dari penghasilan utamanya yakni berupa gaji sebagai imbalan profesi ditambah penghasilan-penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan.

Lazim bahwa meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi profesi guru seiring dengan masa baktinya pada lembaga mereka mengabdikan, baik pada instansi pemerintah maupun lembaga swasta/yayasan. Peningkatan juga seiring dengan

prestasi dan pencapaian kinerja mereka dalam bekerja. Dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya, meningkat motivasi yang selanjutnya mempengaruhi terhadap meningkatnya kinerja guru. Insentif ekonomis yang didapat guru karena kinerjanya, pada akhirnya berpengaruh positif pula terhadap motivasi guru untuk menjadi semakin sejahtera (Kerja et al., 2014).

Struktur penggajian dan pemberian tunjangan kepada para pegawai sipil negara (ASN/PNS) berdasarkan Undang-Undang RI No.5 Tahun 2014 tentang ASN, termasuk guru, adalah gaji dan tunjangan kinerja. Khusus bagi para PNS, ditambah fasilitas-fasilitas lainnya berupa tunjangan istri dan anak, asuransi kesehatan (BPJS), jaminan dan pensiun (Puspita Sari et al., 2023). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti undang-undang sebelumnya (UURI No.14/2014), struktur penggajian dan kesejahteraan bagi ASN akan menjadi lebih menarik lagi dengan adanya pengembangan talenta dan karier melalui *mobilitas talenta* (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN n.d.). Mobilitas talenta ini merupakan sistem merit yang mekanisme penataannya melalui manajemen talenta. Dengan mobilitas talenta ini, gaji ASN akan disetarakan dengan pegawai BUMN (Rachman, 2023).

Perbaiki sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada para PNS di mana di dalamnya juga mencakup para pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS/ASN melalui sistem merit mobilitas talenta tentu saja merupakan angin segar yang akan berimplikasi positif juga terhadap kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan, terkhusus para guru. Penghargaan berbasis analisis beban kerja dan capaian hasil kerja yang berkeadilan, juga bentuk-bentuk penghargaan lainnya kepada kalangan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, jelas akan berdampak positif pula terhadap kualitas layanan mereka terhadap para peserta didik. Jelas pula tingkat keterlayanan para peserta didik akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya nasional yang akan meningkatkan daya saing di kancah persaingan global.

Segala bentuk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di tiap level sedapat mungkin mampu menghilangkan atau menurunkan disparitas pendapatan para guru, baik yang berstatus PNS/ASN atau honorer,

disparitas antar daerah. Masih banyak daerah yang menghargai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS/ASN yang notabene berada di ranah jabatan fungsional, tetapi tunjangan jauh berbeda dibanding mereka yang berada di ranah jabatan struktural.

Namun peningkatan aspek kesejahteraan sosial-ekonomi para guru ini juga harus menjangkau para guru honorer dan juga guru-guru swasta, terutama pada yayasan-yayasan yang masih lemah struktur keuangannya. Bukan cerita mengada-ada bahwa di zaman yang sudah sedemikian maju ini, para guru honorer mendapatkan penghargaan atau kompensasi kerja masih di bawah standar yang jauh dari dapat dikatakan layak sebagai bekal penghidupan baik untuk pribadi, maupun bagi keluarganya. Merekalah yang selayaknya disebut *pahlawan tanpa tanda jasa*. Padahal hakikatnya jasa para guru, baik guru honorer di sekolah-sekolah swasta dan honorer di sekolah-sekolah negeri, dan juga guru-guru PNS, tetap tidak akan terbalas jasanya, berapapun nilainya. Tugas mulia guru harus dimbangi dengan penghargaan materil yang setara dengan kemuliaannya. Tugas utama negara melalui pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan para guru secara keseluruhan. Selain sepuluh hak lainnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 menjamin hak guru untuk mendapatkan penghasilan yang layak, di atas kebutuhan hidup minimum dan juga menerima jaminan kesejahteraan sosial.

4. Simpulan dan Saran

Peta permasalahan yang dianggap menjadi beban mental para guru Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya harus terus digali, dianggap dan dipetakan sehingga solusi-solusinya ditemukan. Setidaknya terdapat empat masalah pada sebagian guru yang dianggap menjadi beban mental para guru, yakni daya dukung birokrasi yang belum optimal dan prima, dilema pergantian kurikulum, tantangan transformasi di era digital, dan sistem kesejahteraan sosial-ekonomi yang belum merata. Ketimpangan sosial ekonomi sangat dirasakan oleh para guru yang berstatus sebagai tenaga honorer dan para guru sekolah swasta.

Karakteristik birokrasi pendidikan di negara kita dinilai masih stereotip, yakni lamban, bertele-tele, koruptif, tidak kreatif dan adaptif terhadap kepentingan pendidikan, serta lebih cenderung menjalankan fungsi konservatifnya sebagai pengontrol daripada sebagai pelayan kepentingan publik. Bagi kepentingan para guru,

karakteristik ini berdampak besar terhadap kenyamanan mereka dalam bertugas. Guru senantiasa dihadapkan pada permasalahan klasik dalam menjalankan tugasnya, di antara tuntutan profesional menjalankan tugasnya, sementara di sisi lain guru juga memerlukan jaminan sosial yang layak. Pada sisi lain, guru sering tidak berdaya memenuhi tuntutan birokrasi.

Pada aspek kurikulum dan setiap pergantiannya, para guru dinilai lamban dalam meresponsnya. Pergantian kurikulum dari periode ke periode seringkali justru menjadi beban mental para guru. Ada sisi wajar dari kondisi ini bila pada kenyataannya pergantian kurikulum pendidikan di negara kita seringkali seiring dengan pergantian dan peralihan rezim-rezim pemerintahan. Publik, termasuk para guru cenderung menilai bahwa pergantian kurikulum dilatarbelakangi oleh selera kekuasaan pemerintah. Namun demikian, karena pendidikan pun tidak dapat lepas dari proses politik, maka sebagai bagian dari subsistem, para guru dituntut untuk menerapkan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Dan pemerintah pun tidaklah gegabah dalam menyusun pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum pasti setelah melalui proses pembahasan ilmiah dan ketat berdasarkan banyak aspek pertimbangan.

Pada aspek lain pula, di tengah kondisi zaman yang serba menuntut kemampuan beradaptasi dengan revolusi dan transformasi digital, banyak guru yang masih rendah kesadaran digitalnya. Hal ini berpengaruh pada lambat dan tidak optimalnya transformasi digital di sektor pendidikan. Pada aspek-aspek digitalitas, guru Indonesia masih dipandang identik dengan konservatisme. Padahal begitu banyak kelimpahan fasilitas digital yang murah yang sangat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Karakteristik para guru ini kontras dengan karakteristik anak-anak didik zaman sekarang (*gen Z*) yang notabene adalah para *digital native*. Akibatnya kualitas pendidikan generasi muda kurang terlayani sesuai kodrat alami dan kodrat zaman.

Pada aspek keempat, masalah kesejahteraan sosial para guru hingga saat ini masih belum layak sesuai dengan tugas mulianya. Ketimpangan sosial-ekonomi masih cukup lebar antar kelompok guru dengan status ASN, guru honorer, serta guru swasta. Negara sebagai pengemban amanat rakyat melalui konstitusi dan undang-undang wajib mensejahterakan para

guru tanpa memandang perbedaan status tempat mengajar.

Kajian deskriptif ini diharapkan menjadi bagian dari sumbangsih kepustakaan terhadap kajian-kajian dengan fokus yang sama, dan umumnya demi kemajuan dunia pendidikan nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Seluruh pemangku kebijakan sektor pendidikan harus sinergis bekerja sama menata sistem pendidikan nasional kita untuk terus menjadi lebih baik. Terkait kembali dengan transformasi digital, serta pentingnya para guru menguasai kecakapan digital secara mumpuni, penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar sudah saatnya mempertimbangkan *kompetensi digital* dijadikan sebagai kompetensi kelima dari empat pilar kompetensi guru lainnya. Tentu saja penulis menyarankan kajian-kajian seperti ini lebih banyak digali, diungkap dan dipetakan agar semakin banyak lahir pemikiran dan solusi alternatif untuk memecahkan masalah, seperti pada fokus kajian ini.

Daftar Pustaka

- Amruddin, A., Arbainsyah, A., Handayani, S., & Sauri, S. (2022). Patologi Birokrasi Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1036.
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.989>
- Anggraena, Y., Felicia, N., Gunanto, E. D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2021). *Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*.
- Apple, M. W. (2021). *Ideologi dan Kurikulum (Terj. Ideology and Curriculum)* (G. N. Rahayu, Ed.; 1st ed.). Cantrik Pustaka.
- Aulia, L. (2023). Peran Pendidikan Administrasi Perkantoran di Era Digital. *Lensa Ilmiah - Jurnal Manajemenn Dan Sumber-saya*, 2(2), 52-55.
<http://journal.ainarapress.org/index.php/lms>
- Ayu, A., Ningsih, W., Negeri, I., Tulungagung, A. R., Muntahibun, M., & Universitas, N. (2022). Dialektika Pendidik Dan Perubahan Kurikulum Di Masa Pandemi. *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 21(2), 367-384.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21274/dinamika.2021.21.02.367-382>
- Baswedan, A. R., & Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas Jakarta, M. (n.d.). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*.
- BPK RI. (n.d.). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003*. Retrieved December 31, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id>
- Budi Hardiman Y, F. (2018). Manusia Dalam Prahara Revolusi Digital. *Diskursus*, 17(2), 177-180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36383/diskursus.v17i2.252>
- Devi, I., Hanani, S., Syafitri, A., Indri Yani Harahap, N., & Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, U. M. (2023). Birokrasi dan Struktur Kekuasaan dalam Organisasi Pendidikan Modern: dengan Pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 268-281.
<https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.790>
- Direktorat Jenderal Perundang-undangan, K. H. dan H. R. I. (2023). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN*. Direktorat Jenderal Perundang-Undang RI.
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2023>
- Hasanah, A., & Haryadi, H. (2022). Tinjauan Kurikulum Merdeka Belajar dengan Model Pendidikan Abad 21 dalam Menghadapi Era Society 5.0. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 266-285.
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.7595>
- Hidayat, R. (2023). Mengenal Pendidikan Islam dan Politik Pendidikan di Indonesia. *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan (AJPP)*, 2(2), 117-124.
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>
- Istanto, I., Yani, A., Tsauri, S., & Handayani, S. (2022). Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), 1065.
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.1000>
- Kamatul Isy, L., Syukrillah, A., Rozak, A., Zuhdi, M., Setiawan, A., Syarif Hiadayatullah Jakarta, U., & Muhammadiyah Jakarta, F. (2023). Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Landasan Psikologis Dalam Mengembangkan Manajemen-Kurikulum Pendidikan. *ISLAMIC MANAGEMENT-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(02), 235-244.
<https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3565>
- Kerja, M., Dan Kinerja Guru Mohammad Zulkifli Alumni Doktor Ilmu Adm Untag Surabaya, K., & Besar FISIP Untag Surabaya, G.

- (2014). *Arif Darmawan Edy Sutrisno* (Vol. 3, Issue 02).
- Maria, D., Silipiya, & Rijal, M. K. (2018). Kesenjangan Birokrasi Pendidikan Menuai Tanya Di Mata Publik. *Tarbiyah Wa Ta'lim: Jurnal Penelitian Pendidikan & Pembelajaran*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/twt.v5i3.2205>
- Mubarok, A. A., Aminah, S., Nasional, I., & Roiba, L. (2021). Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia. *Dirasah Islamiyah*, 3(2), 103–125. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i2.324>
- Muslim, A. (2022). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 34–40. <http://rayyanjournal.com/index.php/jetish/article/view/35>
- Pengelola Web Kemdikbud. (2019, November 29). *Pidato Mendikbud pada Upacara Bendera Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2019*. Kemdikbud RI. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/11/pidato-mendikbud-pada-upacara-bendera-peringatan-hari-guru-nasional-tahun-2019>
- pengelola web kemdikbud. (2023, June 27). *Hampir 70 Persen Satuan Pendidikan Sudah Menerapkan Kurikulum Merdeka*. Kemendikbud. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/hampir-70-persen-satuan-pendidikan-sudah-menerapkan-kurikulum-merdeka>
- Puspita Sari, G., Rozikin, I., & Nababan, J. C. (2023). Peningkatan Kinerja Pegawai Sektor Publik. *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 109–118. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/1043/372>
- Rachman, A. (2023, November 7). *Mantap! Skema Baru, Gaji PNS & Pegawai BUMN Bakal Setara*. CNBC Indonesia.
- Rahman, A. H., Hendrayana, A., & Nur'aeni, A. (2023). *Belajar Mudah bagi Pemula Coursera, LinkedIn, dan Udemy*. Deepublish. www.deepublish.co.id
- Rizki Hadasnyah, R., & Yudha Pradhana, R. (2020). Dinamika Perubahan Kurikulum Di Indonesia. *Arah Manajemen Pada Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19_Seminar Nasional - Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 259–267. <http://conference.um.ac.id/index.php/apfip/article/view/427>
- Sah Kha Mei Zsazsa, C., & Nasution, R. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia. *AFoSJ-LAS*, 3(3), 260–268. <https://jlas.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>
- Santika, G. N., Suarni, N. K., & Lasmawan, W. (n.d.). *Analisis Perubahan Kurikulum Ditinjau Dari Kurikulum Sebagai Suatu Ide*.
- Setkab RI. (n.d.). *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005*. Retrieved December 31, 2023, from setkab.go.id
- Tenri Sanna, A. (2021). *MAPPESONA Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Peran Birokrasi Dalam Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan*. 3(1). <https://doi.org/10.30863/mappesona.v4i1.1769>
- Wisudo, B., Sunarto, K., Pattinasarany, I. R. I. dan K. K. N., Nugroho, H., Seto, A., Kusumawati, L. R., Prasetyo, A. S., Paat, J. Ph. dan P. L. F., Setiadi, A. P., Kristiyanti, E., & Wardhani, M. O. W. (2021). *Pendidikan Untuk Apa Dan Untuk Siapa? Kajian Kritis Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035* (L. R. Kusumadewi, Ed.; 1st ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. www.obo.or.id
- Yoesoef Maolani, D., Purnama Sari, A., Amalia, A., Octavelia Sholeha, C., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Patologi Birokrasi Dan Upaya Pencegahannya Untuk Menciptakan Birokrasi Yang Efisien. *Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1>
- Zabdu Abdul Aziz, F., Setiawan, F., Hariadi, D., & Setianingsih, F. N. (2022). Transformasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sebagai Landasan Pengelolaan Pendidikan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 4(2). <https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>